

Peningkatan Literasi Masyarakat Nagari tentang Ilmu Administrasi Publik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Provinsi Sumatera Barat

Wahib Assyahri^{1*}, Indry², Aziza Bila³, Diga Putri Oktaviane⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

*Jln. Tan Malaka RT 01 RW 05 Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang Kec. Guguak Panjang Bukittinggi

*email: wassyahri.wa@gmail.com

Article History

Received:

Reviewed:

Accepted:

Published:

Key Words

Literacy, Nagari Community, Public Administration, Life of the Nation and State.

Abstract: Administration is often only seen as a writing activity. Physically, administrative activities are dominated by writing activities, even though there are many theories that say administrative activities are more than that. Public administration seeks how the collective government administration process becomes a management government activity (planning, organizing, implementing, supervising development) with work mechanisms and human resource support and administrative support or governance. The implementation method that will be carried out in this community service is at the pre-implementation stage, namely the socialization of activities in the community and the implementation stage, namely the implementation of community empowerment program activities held on August 11, 2023 online through community service seminar web activities. The results of this service are increasing literacy and increasing the knowledge of the nagari community about public administration with a series of activities, namely counseling with the main objective of providing descriptions of the essence of public administration science, the development of public administration science, the challenges of public administration science and public administration strategies facing advances in information technology.

PENDAHULUAN

Definisi administrasi seringkali hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis. Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau computer. Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Administrasi dalam arti sempit sering disamakan dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat,

mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Sedangkan ruang lingkup administrasi sebenarnya sangat luas, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian daripada administrasi tersebut. Ruang lingkup ini sangat perlu diberi kepastian sehingga memudahkan kita membahas tentang administrasi itu sendiri. Ruang lingkup ini akan menjadi batas luasnya administrasi itu sendiri.

Ruang lingkup administrasi meliputi organisasi, manajemen, kepemimpinan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, tata hubungan dan perwakilan. Jika berbicara masalah administrasi dan ruang lingkupnya di Indonesia ternyata masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki karena administrasi di Indonesia tidak dijalankan secara murni. Seharusnya administrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi kerja, tetapi di Indonesia administrasi merupakan sistem yang paling mengesampingkan efisiensi kerja. Masalah tersebut dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia. Prosedur yang terlalu memakan waktu dan biaya sangat menghambat kemajuan bangsa.

Chandler dan Plano (1988:29) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keduanya juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Namun sampai saat ini sebagian ahli mengutarakan bahwa batasan administrasi publik itu tidak ada.

Jika dikaji kembali secara basis ontologi bahwa pengembangan keilmuan

administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu administrasi, adalah hakikat apa yang dikaji dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Maka disini birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi nonpemerintah yang berperan terlibat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain secara kolektif. Menurut Suryadi, secara substansial wilayah kajian pekerjaan manajer memiliki variasi kepentingan dari pemerintahan dan masalah-masalah publik, mulai dari pertahanan dan keamanan sampai pada kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, dari desain dan konstruksi jalan dan jembatan sampai eksplorasi ruang angkasa dan dari masalah pajak dan administrasi keuangan sampai manajemen sumber daya manusia. Administrasi publik menginginkan bagaimana memfokuskan pelayanan yang lebih baik kepada semua manusia warga Negara dengan kreativitas barunya. Kita harus memikirkan jalan terbaik untuk bekerja disemua tingkatan pemerintahan. Kita menghendaki dan mengembangkan kemitraan dengan institusi yang nirlaba dan organisasi-organisasi non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Kita harus mulai dengan pola pendekatan Millennium memiliki tingkat kehirauan dari sejumlah pertanggungjawaban dan yang diminta ditunjukan kepada kita sebagai petugas administrasi publik.

Administrasi publik mengupayakan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolektif menjadi kegiatan pemerintahan yang bersifat manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya. Dalam mekanisme kerjanya diperlukan pertisipasi stake holders pembangunan, seumber daya manusia sebagai penyelenggara di sokong oleh stake holders yang berkualitas. Maka secara garis dan basis ontologi penguatan itu akan terjadi sebagaimana mestinya, dengan bagunan yang kokoh akan menjadi suatu kesatuan dalam pengembangan keilmuan administrasi publik. Secara basis epistemologi berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Jika selama ini ilmuwan administrasi publik lebih berkutat pada diskusi yang bersifat filosofis tentang administrasi, standar etika dan norma bagi manajer publik dalam menjalankan tugasnya, maka ke depan jika administrasi publik berubah menjadi manajemen publik, orientasi keilmuan dari disiplin ini juga akan bergeser pada hal-hal yang lebih empirikal tentang bagaimana mengembangkan keilmuan untuk membantu manajer publik mencapai tujuan organisasi, bagaimana meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas para manajer publik tersebut di depan masyarakat.

Secara basis aksiologi menjelaskan bahwa untuk menciptakan para birokrat-

birokrat yang mana mereka bertanggung jawab, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap realitarealita yang ada di dalam masyarakat. Setelah mengamati realita-realita yang ada di dalam masyarakat tersebut maka harus dikaitkannya dengan konsep-konsep teori yang ditawarkan lalu membuat kebijakan atas realita yang terjadi di masyarakat tersebut. Sehingga disini, tidak hanya sekedar eksistensi atau popularitas saja yang ditonjolkan oleh para birokrat-birokrat. Tetapi mereka harus memahami bagaimana masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik, minimalhnya para birokrat memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan bersama.

Permasalahan

Di dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, model penyelenggaraan pemerintahan mempunyai posisi yang sangat berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan. Setiap model dari penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh paradigma yang sedang berkembang dalam ranah Administrasi Publik pada saat tersebut. Begitu berpengaruhnya sebuah paradigma sampai-sampai setiap negara mengadopsi hal-hal prinsipil yang berkaitan dengan sebuah paradigma ke dalam sistem pemerintahannya bahkan sampai level pemerintahan di tingkat lokal terendah.

Perdebatan tentang kinerja administrasi publik di seluruh dunia selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Baik politisi maupun warga, bahkan juga pegawai administrasi sendiri mengkritisi administrasi dengan kata kunci: 'terlalu

lamban, terlalu mahal, terlalu jauh dari kebutuhan manusia, korup, buruk mutu serta pemborosan anggaran dan sumber daya manusia'. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimana pun, administrasi publik akan memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara yakni kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perjalanan penyelenggaraan peran administrasi publik yang demikian, telah mengalami berbagai macam perkembangan mulai dari masa sebelum lahirnya konsep Negara Bangsa, hingga lahirnya Ilmu modern dari administrasi publik yang sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma, mulai dari model klasik atau di sebut Administrasi Negara Lama atau Old Public Administration, New Public Manajemen (NPM), New Public Service (NPS) hingga sampai pada good governance yang berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Perkembangan administrasi publik tersebut telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi secara internal serta interaksi antara publik dengan politisi, masyarakat dan aktor

lainnya, dalam artian sejauh mana administrasi publik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma yang ada serta sejauh mana penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kontes lokal dan permasalahan yang ada di negara tersebut.

Administrasi publik tidak pernah dapat melepaskan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembangan lingkungan yang ada, khususnya yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan paradigma yang dianutnya sehingga tetap berkesesuaian dan sejalan dengan perubahan lingkungan yang ada di sekelilingnya dimana administrasi publik harus mampu mereformasi dirinya sehingga sejalan dengan paradigma good governance yang menjadi tuntutan masyarakat banyak.

Berangkat dari pemahaman di atas, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk usaha untuk memberikan edukasi dan penggambaran yang komprehensif mengenai pergeseran paradigma Administrasi Publik dari masa ke masa. Melalui penggambaran tersebut diharapkan dapat membantu memberikan pengertian mengenai hakekat dan peranan seharusnya dari Administrasi Publik serta mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Administrasi Publik khususnya saat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi upaya perbaikan

penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan Administrasi Publik yang mampu menerapkan Good Governance yang sejalan dengan konteks Otonomi Daerah yang saat ini berlangsung di Indonesia.

Solusi yang Ditawarkan

Literasi menjadi jawaban untuk menjadikan seseorang beradaptasi dengan baik, mengeksplorasi pengetahuan kearah peningkatan kualitas hidup (Utami, 2020). Dalam dunia yang cepat dan berubah, literasi menjadi keterampilan penting yang membantu setiap orang untuk berkembang secara individual, sosial, dan ekonomi. Membangun literasi masyarakat juga menjadi penting untuk semua aspek kehidupan individu. Mulai dari penanganan urusan pribadi, membina keluarga, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan angkatan kerja. Termasuk literasi masyarakat dalam partisipasinya dalam sistem negara demokrasi.

Membangun literasi masyarakat pedesaan (nagari) menjadi tanggung jawab masyarakat perguruan tinggi sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam mencerdaskan masyarakat. Pendidikan literasi secara tradisional berkaitan dengan pengembangan keterampilan dalam membaca dan menulis yang memungkinkan partisipasi setiap usia masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang literasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan percepatan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah awal adalah dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan literasi masyarakat nagari tentang eksistensi ilmu adminstrasi publik dalam kehidupan bernegara.

Tujuan utama dilaksanakannya pelatihan agar terjadi peningkatan pengetahuan dari proses pembelajaran, dan ketepatan metode pelatihan akan memudahkan pencapaian tujuan pelatihan (Achmat, 2009). Pelatihan yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui roleplay, observasi, diskusi dan brainstorming. Proses pelatihan tersebut akan berjalan dengan lancar apabila peserta terlibat aktif (Saripuddin,et al., 2021). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah metode edukasi dan pelatihan (Saputro & Hastomo, 2020).

Rencana Target Capaian Luaran

Target dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan tentang literasi masyarakat nagari tentang eksistensi ilmu adminstrasi publik dalam kehidupan bernegara di Sumatera Barat. Untuk capaian luaran yang direncanakan dalam kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Rencana Target dan Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator capaian
1	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada
2	Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	<i>Published</i>
3	Peningkatan literasi masyarakat tentang administrasi publik	ada
4	Peningkatan ketentraman masyarakat	ada
5	Promosi Program Studi	ada
6	Hak kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek dagang, desain produk industri)	Tidak ada

Sumber : Olahan Data, 2023

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melakukan sosialisasi terhadap masyarakat nagari yang tersebar di Sumatera Barat melalui kegiatan Web Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Program studi Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan yang akan dilakukan pada Pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada tahap pra pelaksanaan yaitu dilakukan sosialisasi kegiatan pada masyarakat. Tahap pra pelaksanaan dengan cara sosialisasi melalui perkenalan oleh ketua tim PKM memberikan penyampaian tentang maksud dan tujuan dari kegiatan PKM. Selanjutnya, Tahap Pelaksanaan, yang mana pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2023 secara daring melalui kegiatan web seminar pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat nagari tentang admininstrasi publik dengan rangkaian kegiatan yaitu penyuluhan dengan tujuan utama memberikan uraian tentang esensi ilmu admininstrasi publik, perkembangan ilmu admininstrasi publik, tantangan ilmu admininstrasi publik dan strategi admininstrasi publik menghadapi kemajuan teknologi informasi. Langkah akhirnya adalah dengan melakukan Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Waktu dan Tempat

pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2023 secara daring melalui kegiatan Web Seminar pengabdian kepada masyarakat. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	
		Juli 2022	Agustus 2022
1	Pengajuan Proposal		
2	Kegiatan Pengabdian		
3	Pembuatan Laporan PkM		
4	Monitoring dan Evaluasi		
5	Penyerahan Hasil		

Sumber : Olahan Data, 2023

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan memantau secara langsung melalui sesi tanya jawab dengan peserta oleh tim pengabdian dengan melalukan perbandingan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang administrasi. Evaluasi diperlukan secara kontinu dikarenakan kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan secara luring dalam bentuk pelatihan langsung kepada masyarakat terutama perangkat nagari serta pembinaan kepada aparatur nagari selaku lembaga paling dekat dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi administrasi seringkali hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis. Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau computer. Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Menurut The Liang Gie (1993), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan

kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23).

Administrasi Publik cenderung berkaitan dengan pelayanan public, dimana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan begitu penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan maka semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut. Fungsi pelayanan publik dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsep dasar yang dibangun oleh reformasi birokrasi menuju tata dan sistem pengelolaan yang profesional.

Meningkatnya arus informasi dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah lebih peduli dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa

sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang – undangan yang berlaku. Reformasi birokrasi dan pelayanan public sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Paradigma New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS) menunjukkan bahwa terjadi perubahan orientasi administrasi publik yang sangat cepat. Paradigma NPM orientasinya kepada kepuasan pelanggan, sedangkan NPS kepada kualitas pelayanan publik. Kedua paradigma ini berjalan seiring, karena NPS berorientasi kepada kualitas pelayanannya sedangkan NPM berorientasi kepada kepuasan pelanggannya. Sedangkan pada dasarnya pelanggan (publik) puas karena kualitas pelayanannya yang berkualitas.

Paradigma Reinventing Government dikenal juga New Public Management (NPM). Paradigma di atas menjadi populer sebagai prinsip good governance. Dalam paradigma ini diungkapkan bahwa ada tujuh prinsip dalam good governance, antara lain adalah prinsip partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi pada consensus (consensus orientation), keadilan (equity), efektif dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision). (Rosidin.2010;179).

Ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Kep.MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 mengamanatkan agar tetap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Dalam hal ini kepuasan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kepuasan masyarakat dapat dinilai dengan menyurvei atau menyediakan kotak saran dalam lingkungan organisasi tersebut. Dengan adanya kotak saran akan sangat mudah untuk menganalisis atau mengetahui kepuasan masyarakat terhadap suatu organisasi.

Kepuasan masyarakat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan public. Dimana peningkatan kualitas pelayanan public merupakan suatu upaya untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara konseptual kepercayaan publik menjadi sebuah fondasi bahkan dapat dikatakan sebagai perekat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Salah satu tantangan administrasi public kedepan adalah bagaimana sektor publik dapat mengembalikan kepercayaan publik minimal 50% dari jumlah warga negaranya (Marc Holzer, 2022). Oleh karena itu, kurangnya kepercayaan public dapat merusak kemampuan pemerintah dalam melenggarakan pemerintahan.



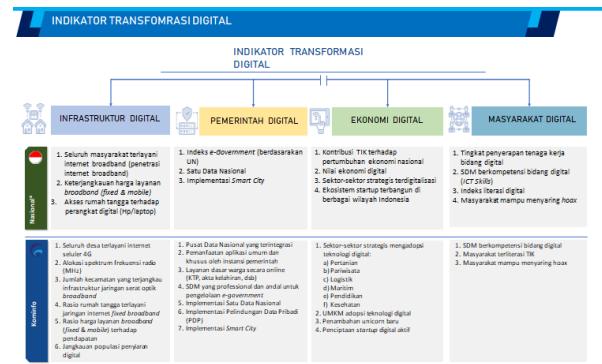
Gambar 3.1 Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber : Kemenpan RB, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tahun 2022. Layanan yang dimaksud berupa 5 jenis layanan yaitu (1) layanan konsultasi, (2) layanan audiensi, (3) Layanan sosialisasi, (4) Layanan data dan Informasi, dan (5) Layanan pengaduan pelayanan public. Peningkatan kepuasan masyarakat dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kepercayaan public terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Administrasi publik di masa depan adalah ingin mencapai pemerintahan digital (digital governance), dimana inovasi dalam pembaharuan pelayanan publik menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Pergeseran pelayanan publik yang beralih dari pelayanan konvensional menuju pelayanan public yang berbasis digital menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif. Dengan adanya digital

governance diharapkan dapat memenuhi hak public dalam mendapatkan pelayanan yang prima.



Gambar 3.2 Indikator Transformasi Digital

Sumber : Kominfo RI

Gambar di atas menunjukkan bahwa transformasi digital saat ini dimulai dari menyiapkan infrastruktur sampai kepada menyiapkan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam menguasai teknologi. SDM berkompetensi dalam bidang digital juga sangat menentukan keberhasilan implementasi digital governance di masa depan. Masyarakat sebagai pengguna (user) dalam layanan publik dituntut juga bisa mengakses layanan ini dengan baik agar nantinya tujuan dari penerapan digital governance dapat tercapai dengan baik.

Berbagai bentuk layanan pengurusan administrasi saat ini sudah mulai beralih kedalam bentuk digitalisasi layanan yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Sehingga dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kepuasan layanan kepada public dan diharapkan dapat membangun kepercayaan public kepada pemerintah. Sehingga pelayanan public yang bersih dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan birokrasi dapat tercapai dengan baik, hal ini juga dapat

mewujudkan terselenggaranya good governance di Indonesia.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatkan pengetahuan masyarakat nagari tentang admininstrasi publik dengan rangkaian kegiatan yaitu penyuluhan dengan tujuan utama memberikan uraian tentang esensi ilmu administrasi publik, perkembangan ilmu administrasi publik, tantangan ilmu administrasi publik dan strategi administrasi publik menghadapi kemajuan teknologi informasi. Langkah akhirnya adalah dengan melakukan Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembinaan yang akan dilakukan oleh tim pengambian kepada masyarakat akan dilanjutkan dengan memonitor peserta dan membantu mengembangkan kemampuannya dalam mewujudkan tujuan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan strategi solutif dan inovatif dalam menghadapi persoalan administratif oleh unsur pemerintah dan masyarakat yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu bentuk keberlanjutan kegiatan, sehingga masyarakat nagari bisa mencapai masyarakat yang mandiri serta pemerintahan yang kreatif dan inovatif.

KESIMPULAN

Tahap persiapan kegiatan PKM ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun awal pada proporsal. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk usaha untuk memberikan edukasi dan penggambaran yang komprehensif mengenai pergeseran

paradigma Administrasi Publik dari masa ke masa. Melalui penggambaran tersebut diharapkan dapat membantu memberikan pengertian mengenai hakekat dan peranan seharusnya dari Administrasi Publik serta mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Administrasi Publik khususnya saat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi upaya perbaikan penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan Administrasi Publik yang mampu menerapkan Good Governance yang sejalan dengan konteks Otonomi Daerah yang saat ini berlangsung di Indonesia.

Referensi

- Faozan, Haris.2003. Mencermati Eksistensi Pelayanan Sektor Publik : Pergeseran Paradigma, Tantangan, Kepemimpinan Dan Pemberdayaan. Jap, Vol. 2003, No. 2. Issn 1214-7040.
- Fauzan, Hasbi Shiddiq. 2017. Filsafat Ilmu Administrasi Sebagai Hakikat Dan Makna Dalam Keilmuan Administrasi Publik. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, Vol. 08 No. 1, ISSN 2087-1511.
- Holzer, Marc. 2022. The Future Of Administration. Public Integrity, Volume 24, Issue 1 (2022).
- Meutia, Intan Fitri. 2013. Reformasi Administrasi Publik. Lampung : Aura.
- Basuki, Johanes. 2021. Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 No (2).

<Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Public-Inspiration>

Rahmawati, Ati. 2020. Membangun Desa Melalui Budaya Literasi. SeTIA Mengabdi - Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 01 No.1.

Ruslan. 2017. Membangun Literasi Masyarakat Melalui Taman Bacaan Masyarakat: Eksplorasi Pengalaman Community Engagement Program di Cot Lamme Aceh Besar. Jurnal ADABIYA, Volume 19 No. 2.

Haerana, Riskasari. 2022. Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6 Nomor 2. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052>.

Utami, M. A. (2020). Peningkatan Literasi Media Digital Sebagai Langkah Edukasi New Normal Di Masa Pandemi. https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunes/32004_3329052011_6_DesaSridadi_20200921_103508.pdf.

Achmat, Z. (2009). Merancang Pelatihan Yang Efektif. Jurnal Psikologi. Vol. 5 No. 2 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/36003>

Saputro, A. E., & Hastomo, W. (2020). Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemagang ke Jepang. 3 (I), 116-122. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde/article/view/483>

Saripudin, D., Yulifar, L., & Anggraini, D. N. (2021). Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Replika Sejarah dan Peta E-Pen Bagi Guru-Guru SMA/MA. Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3 (1), 1-10. <http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/76>.